

## PENGARUH FAKTOR KEUANGAN DAN KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP *FINANCIAL DISTRESS* (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2015-2018)

Yoli Wulandari<sup>1</sup>, Fefri Indra Arza<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Alumni Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

<sup>2</sup>Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

\*Korespondensi: yoliwulandari14@gmail.com

---

**Abstract:** *This study aims to determine the effect of Financial Factors (Effectiveness Ratios, Efficiency Ratios, And Growth Ratios) and Local Government Characteristics (Financial Independence Of Local Governments, Population, Area, And Audit Opinion) on the Financial Distress on the Districts/ Cities in West Sumatra Province in 2016-2018. The data in this study use secondary from BPK and BPS. The sampling technique uses a total sampling method with a total sample of 19 districts / cities with a period of time of 4 years. Analysis of the data using binary logistic regression analysis. The results of this study indicate that (1) ratio of effectiveness has a negative and not significant effect on financial distress, (2) Efficiency ratio has a positive and not significant effect on financial distress, (3) growth ratio has a positive and not significant effect on financial distress, (4) The financial independence of local governments has a negative and not significant effect on financial distress, (5) population has a negative and significant effect on financial distress, (6) Area has a positive and significant effect on financial distress, (7) Audit opinion has a negative and not significant effect on financial distress.*

**Keywords:** *Financial Distress; Financial Factors; Local Government Characteristics*

### How to cite (APA 6<sup>th</sup> style):

Wulandari, Yoli & Arza, F.I (2020). Pengaruh Faktor Keuangan dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Financial Distress (Studi Empiris pada Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat Tahun 2015 -2018). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(3), Seri C, 3179-3196.

---

### PENDAHULUAN

*Financial distress* merupakan ketidakmampuan pemerintah pada setiap kegiatan berdasarkan kebijakannya, baik dalam kegiatan operasi, utang, pembangunan, serta infrastruktur lainnya dalam memenuhi tujuan pelayanan kepada masyarakat, sesuai standar mutu yang telah ditetapkan. Jones dan Walker (2007), menjelaskan *financial distress* diartikan sebagai ketidakmampuan untuk menyediakan layanan di tingkat yang sudah ada berdasarkan standar pelayanan mutu yang telah ditetapkan. Alasan yang menjelaskan mengenai kondisi *financial distress* ialah kurangnya sumber daya pada sebuah organisasi dan keterampilan manajerial yang yang dapat memberikan pengaruh ketidakmampuan untuk memberikan layanan berkualitas dalam menghadapi kondisi yang berubah (Jones & Walker, 2007).

Tekanan *financial distress* pada pemerintah daerah dapat menyebabkan penurunan pengeluaran pemeliharaan dalam memenuhi infrastruktur dan penurunan investasi modal pada infrastruktur untuk mendanai pengeluaran lain (Bumgarner et al (1991) dalam Jones dan Walker (2007)). Untuk memberikan layanan kepada masyarakat, pemerintah daerah diharapkan untuk dapat berinvestasi dalam bentuk infrastruktur serta dapat memeliharanya. Investasi pemerintah daerah dalam menghadapi tekanan *financial distress* adalah investasi publik dalam artian pemerintah daerah yang tercermin dengan belanja modal (Jones & Walker, 2007).

Standar mutu yang ditetapkan terhadap masing- masing daerah dalam melihat kondisi *financial distress* dijelaskan oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri bahwasannya untuk setiap belanja modal pada masing- masing daerah memiliki batas minimum yakni 30%. Jika persentase pengalokasian belanja modal oleh pemerintahan daerah kurang dari 30% maka daerah tersebut belum mampu berinvestasi dengan baik dalam setiap kegiatan pemerintahan yang bertujuan memberikan pelayanan yang terbaik untuk publik atau kesejahteraan masyarakat. Persentase terhadap belanja modal yang menjadi tolak ukur *financial distress* suatu daerah juga dijelaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No 2 Tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dengan porsi belanja modal minimal sebesar 30%.

Provinsi Sumatera Barat memiliki komposisi belanja modal masih dibawah dari 30% berdasarkan ketetapan yang telah ditentukan oleh (Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri). Belanja modal Provinsi Sumatera Barat dari rentang tahun 2015 hingga 2018 tingkat persentase yang dicapai hanya 22,55% dari total belanja daerah, hal ini terlihat dalam realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diterbitkan oleh (Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan). Kabupaten pada Provinsi Sumatera Barat yang berjumlah 12 Kabupaten rata- rata persentase dari realisasi belanja modal dari tahun 2015- 2017 hanyalah 25%, dengan tiga kabupaten yang hanya mampu melebihi batas minimal standar realisasi belanja modal, yakni Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan Kabupaten Solok Selatan dengan persentase lebih dari 30%.

Sedangkan untuk Kota pada Provinsi Sumatera Barat yang berjumlah 7 Kota rata- rata persentase masih dibawah dari standar realisasi belanja modal dari rentang waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 hanya mampu mencapai 24% bahkan terdapat kota yang tingkat persentase masih dibawah 20%, hal ini terlihat dari laporan realisasi anggaran masing- masing laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dari Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat. Persentase yang dijelaskan menandakan Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat masih jauh dibawah ketentuan minimal dari alokasi belanja modal yang menandakan masih rendah investasi pemerintah daerah kondisi ini menggambarkan adanya resiko *financial distress*. *Financial distress* dapat dijadikan sebagai pertimbangan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menilai kinerjanya untuk memenuhi pelayanan publik atau masyarakat. Dengan melihat kondisi *financial distress* pemerintah daerah dapat menilai bagaimana kinerjanya dalam berinvestasi untuk kesejahteraan masyarakat, dan untuk kinerja dari pemerintah daerah dapat dilihat dari laporan keuangan masing- masing pemerintah daerah pada satu periode.

Riset- riset terdahulu diantaranya penelitian Jones dan Walker (2007), Carolina et al (2017), Syurmita (2014), dan Wulandari et al (2018) telah menemukan berbagai variabel yang mempengaruhi *financial distress*. Variabel- variabel tersebut mengelompokkan pada dua faktor yaitu faktor keuangan/ financial dan faktor non keuangan/ karakteristik pemerintah daerah. Faktor keuangan yang dapat mempengaruhi *financial distress* dapat dilihat dari laporan keuangan pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Nomor : 71 Tahun 2010 tentang standar

akuntansi pemerintah yang menjelaskan bahwa tujuan utama laporan keuangan pemerintah daerah ialah menyajikan informasi posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas, pelaporan bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya dalam memberikan pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kemampuan faktor keuangan dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan dapat diukur dengan kinerja keuangan daerah (Mahmudi, 2016). Bentuk dari penilaian kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggung jawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD (Fatiyah & Masnun, 2017). Penilaian kinerja pemerintah berdasarkan berbagai rasio keuangan, diantaranya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas dan Efisiensi, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan (Halim, Akuntansi Keuangan Daerah, 2012). Dalam ukuran yang lebih sederhana, apakah pemerintah daerah makin akuntabel dan transparan dalam mengelola anggaran daerah. Untuk kasus Sumatera Barat, riset Agustin dan Arza (2019) menemukan anomali antara akuntabilitas dan transparansi publik terkait dengan manajemen pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas publik pemerintah daerah meningkat, dimana pemerintah kabupaten dan kota di propinsi Sumatera Barata cukup sering menggunakan website resmi pemda untuk menggugah opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Namun, disisi lain akuntabilitas publik masih relatif rendah, mengingat pada website yang sama dokumen-dokumen terkait pengelolaan anggaran relatif minim ditemukan

*Financial distress* pada pemerintah daerah selain dapat dilihat dari faktor keuangan dapat juga dilihat dari karakter pemerintah daerah dalam menjalankan ke pemerintahannya berdasarkan faktor internal dan eksternal pada daerah tersebut (Syurmita, 2014). Karakteristik pemerintah dapat dilihat dari pengukuran tingkat kemandirian pemerintah tersebut dalam mengelola dana yang ada agar belanja modal memiliki persentase yang cukup besar, bagaimana pemerintah mengalokasikan sesuai dengan jumlah penduduk pada daerah tersebut, pemekaran wilayah pada daerah tersebut yang tentu akan menambah jumlah beban yang ditanggung, serta luas daerah tersebut sehingga pembangunan dan infrastruktur dapat direalisasikan dengan baik (Sari & Arza, 2019).

Syurmita (2014), dalam penelitiannya mengenai pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap *financial distress* menjelaskan dengan komponen kemandirian keuangan, derajat desentralisasi, solvabilitas, populasi penduduk, dan pemekaran wilayah memiliki pengaruh negatif dan positif terhadap *financial distress*. Noviyanti dan Kiswanto (2016), menjelaskan bahwa karakteristik pemerintah daerah dapat menjadi komponen dalam menentukan kinerja pemerintah daerah tersebut yang diukur dengan ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan, belanja daerah, dan ukuran legislatif dimana memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kecuali umur pemerintah dan kekayaan daerah. Selain itu, penelitian Cheisviyanny et.al (2020) menemukan bahwa pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia yang berada dalam kondisi *financial distress* umumnya memiliki karakteristik berupa ketergantungan yang tinggi pada pendanaan pemerintah pusat, jumlah penduduk relatif banyak, luas wilayah relatif kecil.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Jones dan Walker (2007), Wulandari et al (2018), Sari dan Arza (2019), Lazyra (2016), serta Sudarsana dan Rahardjo (2013). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni bukan hanya menggunakan unsur keuangan saja yang dilihat dari faktor keuangannya, tapi juga digabungkan dengan unsur non keuangan yaitu karakteristik pemerintah daerah. Berdasarkan hasil dari penelitian sebelumnya masih banyak perbedaan hasil dari masing-masing peneliti serta lebih banyak

membahas pada pemerintah daerah secara umum atau pemerintahan daerah se- Indonesia. Penelitian ini menggunakan faktor keuangan daerah yang dilihat dari rasio efektivitas, rasio efisiensi keuangan daerah, dan rasio pertumbuhan, sedangkan untuk karakteristik pemerintah daerah dilihat dari tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah, jumlah penduduk, luas wilayah, dan opini audit. Perbedaan lainnya dengan menambahkan variabel opini audit dalam mengukur karakteristik pemerintah daerah dimana pada penelitian sebelumnya hanya membahas temuan audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, disini peneliti tertarik untuk menjadikan variabel opini audit dalam memprediksi *financial distress* pada pemerintah daerah khususnya Sumatera Barat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi *financial distress* yang terjadi pada kabupaten/ kota di provinsi Sumatera Barat serta factor yang mempengaruhinya, maka penulis mengambil judul “ **Pengaruh Faktor Keuangan dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap *Financial Distress* (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota Sumatera Barat 2015- 2018 )** “.

## **REVIU LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Teori Keagenan**

Jensen & Meckling, (1979) menjelaskan teori keagenan (*agency theory*) merupakan hubungan antara *principals* yakni masyarakat dengan *agents* yakni pemerintah. Teori keagenan menjelaskan bahwa pemerintah sebagai *agents* bagi masyarakat tentu akan melakukan kegiatan selain dalam memenuhi pelayanan bagi masyarakat tetapi juga dalam memenuhi kepentingan pribadinya. Teori keagenan ini dapat diterapkan kepada organisasi sektor publik, dimana tujuan organisasi sektor publik yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menyusun kebijakan yang tepat, anggaran yang sesuai, serta pengalokasian belanja modal yang baik dalam membangun infrastruktur, pembangunan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, penjelasan ini juga sesuai dengan pendapat yang dijelaskan oleh (Lane & Erik, 2000) dalam (Halim & Abdullah, Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah, 2015)

### **Teori Kebangkrutan**

Kebangkrutan merupakan keadaan dimana perusahaan tidak mampu menjalankan kegiatan operasionalnya dalam memperoleh laba, atau kegagalan dimana perusahaan tidak mampu memperoleh pendapatan sehingga entitas tersebut kesulitan dalam sumber dana (Sartika, 2016). Kebangkrutan dalam pemerintah daerah juga dapat dilihat dari ketidakmampuan pemerintah daerah dalam memenuhi pelayanan publik, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dikarenakan masih rendahnya alokasi terhadap belanja modal yang mempunyai tujuan utama dalam pelayanan public dengan rendahnya alokasi belanja modal dapat mengindikasikan kondisi *financial distress* (Mastuti, Safii, & Azizah, 2013).

### **Teori ketergantungan sumber daya**

Teori ketergantungan dikemukakan oleh Emerson (1961) dalam Sari dan Arza (2019), menjelaskan hubungan antara kekuasaan dengan konsep ketergantungan dalam suatu organisasi. Ketergantungan merupakan bagian dari kekuasaan, dimana organisasi yang memiliki kekuasaan berkaitan dengan lingkungan sekitar mengenai tugas dan wewenang yang di emban oleh organisasi tersebut. Teori ketergantungan sumber daya menggambarkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam mengelola dan mengurus daerahnya masing-masing (Sari & Arza, 2019).

### ***Financial Distress***

*Financial distress* merupakan ketidakmampuan organisasi dalam mencapai tujuannya dikarenakan banyaknya hambatan, atau ketidakmampuan dalam memenuhi pelayanan, sehingga memungkinkan terjadinya kebangkrutan. *Financial distress* pada pihak swasta atau perusahaan merupakan kegagalan arus kas pada laporan keuangan perusahaan yang menyebabkan ketidakmampuan dalam memenuhi kegiatan operasional serta membayar kewajiban perusahaan pada tahun periode, sehingga dapat menyebabkan kegagalan kontrak antara perusahaan dengan kreditur maupun investor (Tubelis, 2015).

*Financial distress* dalam konteks sektor publik adalah suatu kegagalan yang pemerintah dalam menyediakan pelayanan ataupun fasilitas publik yang sesuai dengan standar hal ini diakibatkan oleh kekurangan dana oleh pemerintah dalam melakukan pembangunan irigasi, jembatan, maupun kebutuhan publik lainnya, serta tidak adanya keseimbangan yang berkelanjutan antara pendapatan yang dihasilkan oleh daerah tersebut dengan belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tersebut (Jones & Walker, 2007).

### **Faktor Keuangan**

Munawir (2010:106) menjelaskan bahwa rasio keuangan merupakan rasio yang digunakan oleh suatu organisasi dimana dapat melihat bagaimana keadaan keuangan pada masa yang akan datang, jadi rasio keuangan dapat melihat bagaimana kesehatan keuangan suatu organisasi tersebut baik swasta maupun publik. Pada pemerintah daerah rasio keuangan juga dapat digunakan dalam melihat kesehatan dari keuangan pemerintah, khususnya pemerintah daerah dalam mempertanggung jawabkan otonomi daerah yang telah diterima. Yanti (2018), menyebutkan bahwasanya penggunaan analisis rasio keuangan pada sektor publik khususnya pemerintah daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum banyak dilakukan sehingga secara teori belum ada kesepakatan bulat mengenai pengukurannya. Penelitian ini menggunakan faktor keuangan dalam memprediksi *financial distress* pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat dengan penilaian kinerja pemerintah berdasarkan berbagai rasio keuangan, diantaranya Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Rasio Pertumbuhan (Halim, Akuntansi Keuangan Daerah, 2012).

### **Hubungan Antara Rasio Efektivitas Terhadap *Financial Distress***

Rasio efektivitas memberikan gambaran kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan daerah nya dan realisasi pendapatan daerah dibandingkan dengan target pendapatan yang harus diperoleh oleh pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah yang dapat dilihat dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (Lazyra, 2016). Semakin tinggi rasio efektivitas yang diperoleh oleh pemerintah daerah menandakan bahwa kemampuan daerah yang baik karena persentase realisasi pendapatan atas kemampuan rill daerah dibandingkan dengan anggaran pendapatan yang telah ditentukan sebelumnya (Halim, Akuntansi Keuangan Daerah, 2012)

Rasio efektivitas yang tinggi menandakan kemampuan rill daerah yang bagus (Lazyra, 2016) sehingga kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan baik. Kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik menandakan pemerintah mampu merealisasikan pendapatan rill daerah dengan baik sehingga pemerintah daerah akan cenderung terhindar dari indikasi *financial distress*. Kemampuan pelayanan pemerintah daerah terhadap masyarakat dapat dilihat dari bagaimana pemerintah daerah berinvestasi kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan infrastruktur yang berkualitas (Jones & Walker, 2007) hal tersebut dapat dilihat dari rasio

efektivitas yang menggambarkan perbandingan pendapatan daerah yang telah direalisasikan dengan anggaran yang ditetapkan sebelumnya dan pemerintah daerah mampu mengelola dengan baik. Berdasarkan hal diatas dan penjelasan dalam kajian teori maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut :

**H<sub>1</sub>**: Rasio efektivitas berpengaruh signifikan negatif terhadap *financial distress*.

### **Hubungan Antara Rasio Efisiensi Terhadap *Financial Distress***

Efisiensi berhubungan dengan kegiatan operasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode, dimana proses kegiatan operasional pemerintah daerah dapat dikatakan efisien apabila menggunakan sumber daya atau dana dengan serendah- rendahnya yang diaplikasikan oleh pemerintah daerah dalam belanja daerah (Lazyra, 2016). (Mahmudi, 2016) menjelaskan semakin kecil rasio efisiensi maka kinerja keuangan pemerintah daerah dikatakan bagus karena pemerintah daerah mampu menekan dana yang dikeluarkan dalam membiayai belanja langsung atau yang berkaitan dengan kegiatan operasional. Rasio efisiensi yang kecil menjelaskan pemerintah daerah mampu menekan biaya operasional yang dibandingkan dengan realisasi pendapatan riil daerah sehingga dana tersebut dapat dialihkan kepada belanja modal pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan pembangunan ataupun infrastruktur kepada masyarakat. Berdasarkan hal diatas dan penjelasan dalam kajian teori maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>** : Rasio efisiensi berpengaruh signifikan positif terhadap *financial distress*.

### **Hubungan Rasio Pertumbuhan Terhadap *Financial Distress***

Rasio pertumbuhan merupakan rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan mampu meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai pemerintah daerah dari periode sebelumnya menuju periode selanjutnya. Rasio pertumbuhan berfungsi untuk mengevaluasi potensi dari masing- masing daerah yang memerlukan perhatian dari pemerintah daerah. Menurut Halim (2012) untuk rasio pertumbuhan yang semakin tinggi nilai total pendapatan daerah, pendapatan asli daerah, dan belanja modal yang diikuti oleh semakin rendahnya belanja operasi, maka pertumbuhannya adalah positif artinya daerah tersebut mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode sekarang menuju periode berikutnya. Rasio pertumbuhan yang positif pemerintah daerah mampu mengalokasikan belanja modal dengan baik dan melibehi standar ketetapan dan dapat menekan dari belanja operasi, menandakan pemerintah daerah mampu dalam melakukan investasi pembangunan dan infrastruktur kepada masyarakat yang berarti bahwa pemerintah daerah tidak mengalami *financial distress* (Subiyanto & Halim, 2008). Berdasarkan hal tersebut dan penjelasan dalam kajian teori dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>3</sub>** : Rasio pertumbuhan berpengaruh signifikan negatif terhadap *financial distress*.

### **Karakteristik Pemerintah Daerah**

Karakteristik mempunyai arti yakni ciri- ciri khusus, atau watak khusus yang membedakan dengan pihak lain. Apabila dihubungkan dengan pemerintah daerah memiliki arti ciri khusus mengenai daerah tersebut serta ciri- ciri khusus pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah yang bertujuan kepada pelayanan publik. Sari dan Arza (2019), menjelaskan bahwa karakteristik pemerintah daerah dapat dilihat dari dua ukuran yakni ukuran internal dan eksternal, dimana faktor internal terdiri dari umur administratif dan eksternal dari sudut pandang hutang dan pendapatan. Faktor internal tersebut dapat diukur dengan menggunakan proksi tingkat

kemandirian keuangan pemerintah daerah, pemekaran wilayah pada daerah tersebut. Penelitian ini menggunakan karakteristik pemerintah daerah dalam melihat indikasi kebangkrutan atau *financial distress* dengan faktor internal karakteristik pemerintah daerah yang menggunakan proksi pengukuran kemandirian pemerintah, jumlah penduduk, dan luas wilayah di Sumatera Barat.

### **Hubungan Kemandirian Keuangan Pemerintah Terhadap *Financial Distress***

Kemandirian pemerintah daerah merupakan kemampuan dari pemerintah daerah dalam mengelola kemampuan yang dihasilkan daerahnya, seperti dalam pembangunan daerah, mampu membiayai setiap kegiatan yang dilakukannya, serta mampu memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Menurut Halim (2012) menyatakan kemandirian keuangan pemerintah daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah.

Hal ini menggambarkan tingginya tingkat partisipasi masyarakat seperti halnya membayar pajak daerah dalam bentuk pendapatan asli daerah maka menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat juga meningkat (Lazyra, 2016). Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah maka pemerintah daerah cenderung tidak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kesejahteraan masyarakat dan terhindar dari kondisi *financial distress*. Berdasarkan hal tersebut dan penjelasan dalam kajian teori dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>4</sub>:** Kemandirian keuangan pemerintah daerah berpengaruh signifikan negatif terhadap *financial distress*.

### **Hubungan Jumlah Penduduk Terhadap *Financial Distress***

Jumlah penduduk merupakan sejumlah manusia atau masyarakat yang bertimpal tinggal atau menetap pada sebuah daerah, berkewajiban dalam memenuhi peraturan daerah tersebut serta, memiliki hak dalam mendapatkan pelayanan publik sehingga memperoleh kesejahteraan. Mahayani dan Gayatri, (2017), jumlah penduduk mampu untuk memoderasi pengaruh kemandirian keuangan dan *level of capital outlay* terhadap *financial distress*. Syurmita, (2014) menjelaskan semakin banyak populasi penduduk suatu daerah maka semakin besar tingkat pelayanan publik yang harus diberikan, maka hal itu dapat menggambarkan bagaimana kinerja pemerintah serta terhindar dari adanya indikasi kebangkrutan. Berdasarkan hal tersebut dan penjelasan dalam kajian teori dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>5</sub>:** Jumlah penduduk berpengaruh signifikan positif terhadap *financial distress*.

### **Hubungan Luas Wilayah Terhadap *Financial Distress***

Luas wilayah merupakan ruang atau kesatuan geografis beserta beberapa unsur yang berkaitan, yang memiliki batas dan sistem dan ditentukan berdasarkan aspek administrative dan aspek fungsional. Syurmita (2014), menjelaskan bahwa semakin luas wilayah tersebut maka semakin besar kebutuh akan pelayanan dari masyarakat. Marfiana dan Kurniasih (2014), menjelaskan bahwasannya luas kabupaten memiliki lebih banyak kebutuhan prasarana dari pada wilayah kota. Berdasarkan hal tersebut dan penjelasan dalam kajian teori dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>6</sub> :** Luas wilayah berpengaruh signifikan positif terhadap *financial distress*.

### **Hubungan Opini Audit Terhadap *Financial Distress***

Opini audit merupakan pernyataan yang profesional sebagai kesimpulan mengenai laporan keuangan untuk melihat tingkat kewajaran informasi tersebut yang dilakukan oleh pihak pemeriksa yang independen. Pada pemerintah daerah opini audit dilakukan oleh BPK perwakilan provinsi Sumatera Barat. Indriaty (2017), menjelaskan bahwa semakin wajar opini audit maka semakin kecil kemungkinan pemerintah daerah untuk mengalami *financial distress*, karena melibatkan bagaimana kinerja dari pemerintah daerah tersebut. Berdasarkan hal tersebut dan penjelasan dalam kajian teori dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>7</sub>** : Opini audit berpengaruh signifikan negatif terhadap *financial distress*.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah penelitian kausatif. Penelitian kausatif berguna untuk menganalisis pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah pendekatan atau metode kuantitatif.

### **Populasi dan Sampel**

Penelitian ini mengambil populasi seluruh pemerintah daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *total sampling* yakni menjadikan seluruh jumlah populasi kabupaten/ kota di Sumatera Barat yang berjumlah 19 kabupaten/ kota diantaranya Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kep. Mentawai, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, dan Kota Solok menjadi sampel dalam penelitian karena mengingat sedikit nya jumlah populasi yang akan diteliti.

### **Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Sumber data dari penelitian ini ialah dari APBD yang dijelaskan oleh (Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri), laporan keuangan pemerintah daerah, serta opini mengenai daerah tersebut yang informasinya dapat dilihat di Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ), Badan Pusat Statistik ( BPS ) perwakilan Sumatera Barat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.

### **Variabel Penelitian dan Pengukuran**

Variabel dependen dalam penelitian ini ialah *financial distress*. Persentase terhadap belanja modal yang menjadi tolak ukur *financial distress* suatu daerah juga dijelaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No 2 Tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dengan porsi belanja modal minimal sebesar 30%. Pengukuran yang digunakan dalam melihat kondisi *financial distress* ialah dengan membandingkan belanja modal pemerintah daerah dengan total belanja daerah.

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini ialah rasio keuangan dan karakteristik pemerintah dimana masing- masing variabel menggunakan pengukuran sebagai berikut:



1. Rasio efektivitas

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pendapatan}}{\text{Anggaran pendapatan}}$$

2. Rasio Efisiensi

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Realisasi belanja daerah}}{\text{Realiasi pendapatan daerah}}$$

3. Rasio Pertumbuhan

$$\text{Rasio pertumbuhan} = \frac{\text{PAD tahun t} - \text{PAD tahun t-1}}{\text{PAD tahun t-1}}$$

4. Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah

Kemandirian keuangan pemerintah daerah diukur dengan membandingkan pendapatan asli daerah dengan total belanja pemerintah daerah.

5. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk merupakan sejumlah manusia atau masyarakat yang bertimpal tinggal atau menetap pada sebuah daerah, berkewajiban dalam memenuhi peraturan daerah tersebut serta, memiliki hak dalam mendapatkan pelayanan publik sehingga memperoleh kesejahteraan. Pengukuran yang digunakan ialah  $\ln$  populasi penduduk.

6. Luas Wilayah

Luas wilayah menggambarkan bagaimana pemerintah bertindak dalam memberikan pelayanan pada masing- masing wilayah, wilayah yang mempunyai luas yang besar maka kebutuhan akan sarana dan prasana semakin banyak, maka pemerintah harus mampu memberikan pelayanan yang tepat kepada masing- masing daerah sesuai dengan apa yang dibutuhkan, hal ini juga dijelaskan didalam. Pengukuran luas wilayah menggunakan  $\ln$  luas wilayah.

7. Opini Audit

Pengukuran opini audit dapat digunakan dengan opini audit:  $\ln$  opini audit. Opini audit dari masing- masing laporan keuangan pemerintah daerah diukur dengan menggunakan *variabel dummy*, dimana 1= opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan 0= opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

### Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis deskriptif dan analisis regresi logistic biner. Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi logistik biner (*binary logistic regression*). Regresi logistik biner digunakan apabila variabel dependennya berupa variabel biner. Dalam penelitian ini variabel biner yang memiliki dua tingkatan berbeda

yaitu Pemerintah daerah yang mengalami *financial distress* dan pemerintah daerah yang tidak mengalami *financial distress*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pemerintah daerah Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah 12 Kabupaten dan 7 Kota. Pemerintah Daerah di Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Barat sebagai populasi dan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik sampel yaitu total sampling dimana menjadikan seluruh data populasi menjadi sampel penelitian.

### Statistik Deskriptif

**Tabel 1**  
**Analisis Deskriptif**

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
<b>Rasio Efektivitas</b>	76	893	1036	973.39	25.829	667.122
<b>Rasio Efisiensi</b>	76	802	1145	951.92	66.198	4382.154
<b>Rasio Pertumbuhan</b>	76	-402	940	128.28	312.188	97461.136
<b>Kemandirian</b>	76	45	264	101.05	42.364	1794.744
<b>Jumlah Penduduk</b>	76	50883	939112	278412.93	209755.290	4399728189 1.636
<b>Luas Wilayah</b>	76	23	601135	138915.95	200309.406	4012385823 6.744
<b>Opini Audit</b>	76	0	1	.87	.340	.116
<b>Valid N (listwise)</b>	76					

Sumber: Data diolah tahun 2020

Hasil statistik deskriptif pada tabel 2.2 menunjukkan bahwasannya dari 19 kabupaten/ kota di Provinsi Sumatera Barat dengan periode pengamatan selama 4 tahun sehingga totalnya berjumlah 76 kabupaten/ kota. Terdapat 65 pemerintah daerah yang mengalami *financial distress* dengan persentase 100% dan terdapat 11 pemerintah daerah yang tidak mengalami atau non *financial distress* dengan persentase 0%. Maka total kondisi *financial distress* secara keseluruhan dari penelitian ini ialah sebesar 85,5%.

### *Binary Logistic Regression Analysis*

#### **-2 log likelihood**

Nilai dari hasil -2 log likelihood dapat melihat kelayakan model yang digunakan pada penelitian, dengan membandingkan -2 log likelihood awal sebelum ditambahkan dengan variabel independen dengan hasil dari -2 likelihood akhir yang telah ditambahkan dengan variabel independen yang diolah pada program SPSS.

**Tabel 2**  
**Overall model fit**

Keterangan	-2 log likelihood
Block number = 0 ( sebelum ditambahkan variabel independen)	62.847
Block number = 1 ( sesudah ditambahkan variabel independen)	37.484

Sumber: Data yang diolah pada tahun 2020

**Tabel 3**  
**Omnibus Tests of Model Coefficients**

Omnibus Tests of Model Coefficients		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	25.363	7	.001
	Block	25.363	7	.001
	Model	25.363	7	.001

Sumber: Data yang diolah pada tahun 2020

Penurunan nilai -2 log likelihood yang dinyatakan sebesar 25,363 tersebut sesuai dengan aturan -2 log likelihood dimana nilai setelah ditambahkan dengan variabel independen harus kecil dari nilai yang sebelum ditambahkan variabel independen sehingga mengalami penurunan, sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan model baik atau mampu dalam menguji hipotesis pada penelitian ini.

#### **Uji Nilai Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test**

Uji nilai *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* dilakukan untuk membuktikan bahwa data empiris yang diambil pada penelitian memiliki kecocokan atau sesuai dengan model regresi yang digunakan dalam penelitian atau tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga model penelitian dapat dikatakan sesuai model atau fit.

**Tabel 4**  
**Nilai Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test**

Hosmer and Lemeshow Test			
Step	Chi-square	df	Sig.
1	6.886	8	.549

Sumber: Data yang diolah tahun 2020

Berdasarkan tabel 3.3 Nilai *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* di atas menunjukkan nilai signifikansi 0,549 yang lebih besar dari 0,05. Berdasarkan aturan dari uji *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa model mampu memprediksi nilai observasinya artinya model dapat diterima karena cocok dengan data yang diobservasi dalam penelitian.

## Classification Table

Tabel 5

		Predicted			
		Financial Distress		Percentage Correct	
	Observed	FD Dibawah 30%	Non FD Diatas 30%		
Step 1	Financial Distress	FD Dibawah 30%	64	1	98.5
		Non FD Diatas 30%	6	5	45.5
Overall Percentage				90.8	

Sumber: Data yang diolah tahun 2020

Terdapat 65 pemerintah daerah yang mengalami *financial distress* yang dilihat dari tabel 2.2, namun pada hasil observasi pada tabel 3.4 menunjukkan 64 pemerintah daerah yang secara tepat mengalami kondisi *financial distress* sedangkan sisanya 1 pemerintah daerah secara tidak tepat sebagai non *financial distress*. Secara keseluruhan tingkat ketepatan *financial distress* adalah sebesar 98,5%. Pemerintah daerah yang mengalami non *financial distress* yaitu sebanyak 11 pemerintah daerah pada tabel 2.2, namun pada hasil observasi pada tabel 3.4 menunjukkan 5 pemerintah daerah yang secara tepat mengalami kondisi non *financial distress*, sedangkan untuk sisanya 6 pemerintah daerah yang secara tidak tepat sebagai *financial distress*, secara keseluruhan tingkat ketepatan non *financial distress* adalah 45,5%. Jadi untuk total keseluruhan ketepatan *classification table* menunjukkan estimasi *financial distress* ialah sebesar 90,8%.

## Uji Negelkerke R<sup>2</sup>

Tabel 6

### Uji Negelkerke R<sup>2</sup>

Model Summary				
Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square	
1	37.484 <sup>a</sup>	.284	.504	

Sumber: Data diolah tahun 2020

Berdasarkan tabel 3.5 uji negelkerke  $r^2$  menunjukkan bahwa nilai dari Nagelkerke R<sup>2</sup> adalah 0,504 atau 50,4% artinya rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, kemandirian keuangan pemerintah daerah, jumlah penduduk, luas wilayah, dan opini audit mampu menjelaskan pengaruh terhadap *financial distress* dalam model yang digunakan yaitu sebesar 50,4% sedangkan sisanya 49,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti atau diluar dari variabel penelitian ini.

## Uji parameter regresi logistic

Uji parameter atau koefisien regresi merupakan nilai yang menggambarkan besaran dan arah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini kriteria pengujian yang digunakan adalah jika nilai probabilitas variabel independen lebih kecil dari 5%, maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*, sebaliknya jika nilai probabilitas variabel independen lebih

besar dari 5% maka dapat dikatakan bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*. Berikut hasil dari parameter regresi logistik pada penelitian ini..

**Tabel 7**  
**Uji parameter regresi logistik**  
**Variables in the Equation**

		B	S.E.	Wald	df	Sig.
Step 1 <sup>a</sup>	Rasio Efektivitas	-.041	.021	3.779	1	.052
	Rasio Efisiensi	.002	.008	.104	1	.747
	Rasio Pertumbuhan	.003	.002	2.795	1	.095
	Kemandirian	-.007	.021	.095	1	.758
	Jumlah Penduduk	-.003	.001	7.523	1	.006
	Luas Wilayah	.001	.000	6.048	1	.014
	Opini Audit (1)	-1.064	1.359	.613	1	.433
	Constant	63.080	27.936	5.099	1	.024

a. Variable(s) entered on step 1: Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Pertumbuhan, Kemandirian, Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Opini Audit .

Sumber: Data yang diolah pada tahun 2020

Berdasarkan tabel 3.6 di atas, diketahui bahwa variabel independen jumlah penduduk dan luas wilayah yang memiliki nilai signifikan  $< 0,05$  berarti variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kondisi *financial distress* pemerintah daerah. Sedangkan untuk variabel independen rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, kemandirian keuangan pemerintah daerah, dan opini audit memiliki nilai signifikan  $> 0,05$  berarti variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap kondisi *financial distress* pemerintah daerah.

## PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

### Pengaruh Rasio Efektivitas Terhadap *Financial Distress*

Hasil pengujian hipotesis pertama memiliki nilai signifikansi 0,052 dan koefisien sebesar -0,041. yang menggambarkan bahwasannya rasio efektivitas berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *financial distress* sehingga hipotesis pertama ( $H_1$ ) ditolak. Rasio efektivitas yang berarah negatif menjelaskan bahwa semakin tinggi rasio maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik, namun rasio efektivitas yang tinggi belum tentu dapat menggambarkan kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan belanja modal sesuai dengan standar dalam memenuhi pelayanan publik.

Rasio efektivitas yang mengalami peningkatan maupun penurunan yang dialami oleh laporan keuangan pemerintah daerah dapat menggambarkan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatan serta menghindari dari kekurangan dana dalam memenuhi pengeluaran, akan tetapi tidak selalu dapat menjelaskan secara langsung kondisi *financial distress*, karena realisasi PAD tidak dapat secara langsung menggambarkan kemampuan pendapatan daerah tersebut dalam menjelaskan pengalokasian belanja modal untuk alokasi pelayanan masyarakat (Rasuli & Silfi, 2013). Sehingga dapat disimpulkan semakin tingginya rasio efektivitas maka semakin bagus kinerja pemerintah daerah akan tetapi tidak dapat menjelaskan secara langsung terhadap kekurangan dana dalam alokasi belanja modal atau kondisi *financial distress*.

### **Pengaruh Rasio Efisiensi Terhadap *Financial Distress***

Hasil pengujian hipotesis kedua memiliki nilai signifikansi sebesar 0,747 dan nilai koefisien sebesar 0,002 yang menggambarkan bahwasannya rasio efisiensi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *financial distress* sehingga hipotesis kedua ( $H_2$ ) ditolak. Rasio efisiensi yang mempunyai arah positif menjelaskan bahwasannya semakin tinggi rasio efisiensi maka menggambarkan kinerja pemerintah daerah yang kurang bagus, karna tidak efisien dalam mengalokasikan dana yang ada untuk pengeluaran, sehingga akan memungkinkan dalam kekurangan dana untuk memberikan pelayanan kepada publik atau mengalami kondisi *financial distress*.

Tingkat rasio efisiensi tidak dapat menggambarkan *financial distress* secara langsung karna pada hasil penelitian rasio efisiensi berada dikisaran tingkat efisien akan tetapi tingkat kondisi *financial distress* pada kabupaten/ kota masih tinggi, maka rasio efisiensi tidak dapat menggambarkan lokasi belanja modal secara langsung karena pada belanja daerah alokasi lebih besar digunakan untuk belanja pegawai yang menyebabkan alokasi belanja modal kurang dari standar sehingga pelayanan publik tidak maksimal dilakukan (Rasuli & Silfi, 2013). Sehingga dapat disimpulkan semakin tinggi tingkat rasio efisiensi menggambarkan kinerja keuangan pemerintah yang kurang bagus dalam mengalokasikan pengeluaran akan tetapi rasio efisiensi tidak dapat secara langsung menggambarkan kondisi *financial distress*.

### **Pengaruh Rasio Pertumbuhan Terhadap *Financial Distress***

Hasil pengujian hipotesis ketiga memiliki nilai signifikansi sebesar 0,095 dan nilai koefisien sebesar 0,003 yang menggambarkan bahwasannya rasio pertumbuhan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *financial distress* sehingga hipotesis ketiga ( $H_3$ ) ditolak. Rasio pertumbuhan pada penelitian ini memiliki arah positif terhadap *financial distress* menjelaskan bahwasannya semakin tinggi rasio pertumbuhan maka semakin tinggi tingkat *financial distress* pada suatu pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari besarnya PAD yang diperoleh oleh daerah menunjukkan kinerja keuangan pemerintah yang bagus, sehingga biaya yang dikeluarkan agar mampu memperoleh PAD maka biaya yang dikeluarkan juga besar, karena pertumbuhan PAD yang tinggi belum tentu memiliki beban yang sedikit, sehingga besarnya biaya dalam PAD memungkinkan alokasi belanja modal sedikit kemungkinan *financial distress* dapat terjadi (Rahayu & Sopian, 2017).

Hasil ini juga dapat dilihat dari efisiensi penggunaan PAD sudah efisien akan tetapi persentase untuk belanja modal masih dibawah dari 30% yang mana hanya mampu pada rata-rata 23% pada tabel 1.2 dari total belanja daerah hal disebabkan alokasi pendapatan lebih besar digunakan untuk belanja operasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio pertumbuhan tidak dapat mempengaruhi secara langsung terhadap *financial distress*.

### **Pengaruh Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap *Financial Distress***

Hasil pengujian hipotesis ke empat memiliki nilai signifikansi sebesar 0,758 dan nilai koefisien sebesar -0,007 yang menggambarkan bahwasannya kemandirian keuangan pemerintah daerah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *financial distress* sehingga hipotesis keempat ( $H_4$ ) ditolak. Kemandirian keuangan pemerintah daerah yang tidak signifikan menjelaskan bahwa kemandirian keuangan pemerintah daerah yang tinggi tidak selalu dapat meningkatkan alokasi yang diberikan dalam belanja modal dalam melayani masyarakat sehingga dapat menurunkan kondisi *financial distress* (Rusdi & Fuad, 2018). Pemerintah daerah yang memiliki kemandirian keuangan tinggi dimana pemerintah daerah tidak bergantung pada dana

transfer pemerintah pusat atau provinsi, cenderung tidak akan mengalami *financial distress* atau memiliki ketersediaan dana untuk membiayai pengeluaran diluar kebutuhan rutin. Penelitian ini juga sejalan dengan dengan teori ketergantungan sumber daya yang dikemukakan oleh Emerson (1961) dimana pemerintah yang mampu meningkatkan sumber daya pada tingkat kemandirian akan mampu dalam mengatasi *financial distress* dikarenakan.

Tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah yang tinggi belum tentu bisa memenuhi pelayanan publik sesuai dengan standar dikarenakan sebagian dari pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggarannya untuk belanja pegawai (Sari & Arza, 2019). Sehingga dapat disimpulkan kemandirian keuangan pemerintah daerah yang tinggi belum tentu dapat menurunkan kondisi *financial distress*.

### **Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap *Financial Distress***

Hasil pengujian hipotesis kelima memiliki nilai signifikansi sebesar 0,006 dan nilai koefisien sebesar -0,003 yang menggambarkan bahwasannya jumlah penduduk berpengaruh negatif signifikan terhadap *financial distress*, sehingga hipotesis kelima ( $H_5$ ) ditolak. Jumlah penduduk yang mempunyai arah negatif terhadap *financial distress* menjelaskan bahwasannya semakin tinggi jumlah penduduk pada daerah tersebut maka semakin rendah tingkat *financial distress*, jumlah penduduk pada daerah tersebut menggambarkan jumlah sumber daya yang dapat digunakan pada pemerintah daerah tersebut, jumlah penduduk yang tinggi cenderung tidak akan mengalami *financial distress* dikarenakan jumlah penduduk yang tinggi menggambarkan sumber daya yang tinggi pada daerah tersebut, sumber daya yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan daerah tersebut yang berasal dari penduduk yang berasal dari pajak dan retribusi (Syurmita, 2014).

Jumlah penduduk yang lebih banyak memiliki tingkat kepatuhan yang lebih baik terhadap prinsip akuntansi serta semakin banyak populasi penduduk yang dimiliki sebuah Kabupaten/Kota, maka probabilitas mengalami *financial distress* akan semakin kecil dikarena populasi penduduk menggambarkan besaran transfer (sumber daya) yang dimiliki pemerintah hal ini dijelaskan oleh Evans (1987) dalam penelitian (Syurmita, 2014). Sehingga dapat disimpulkan jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *financial distress*.

### **Pengaruh Luas Wilayah Terhadap *Financial Distress***

Hasil pengujian hipotesis keenam memiliki nilai signifikansi sebesar 0,014 dan nilai koefisien sebesar 0,001 yang menggambarkan bahwasannya luas wilayah berpengaruh positif signifikan terhadap *financial distress* sehingga hipotesis keenam ( $H_6$ ) diterima. Luas wilayah pada setiap kabupaten/ kota mencerminkan tingkat kebutuhan daerah atas penyediaan layanan sarana dan prasarana per satuan wilayah, semakin besar luas wilayah pada setiap daerah menggambarkan semakin banyak juga sarana dan prasarana yang harus disediakan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Luas wilayah dalam penelitian ini merupakan ukuran besarnya daerah wewenang suatu pemerintahan yang dapat diukur dengan angka, yang mana luas wilayah antara satu daerah dengan daerah lainnya tidak sama (Sari & Arza, 2019).

Kebutuhan sarana yang diperlukan pada wilayah yang lebih luas memerlukan banyak biaya dari alokasi belanja modal agar setiap wilayah pada masing- masing pemerintah daerah, berdasarkan jumlah alokasi belanja modal pada masing- masing pemerintah daerah alokasi pada setiap lpkd alokasi belanja modal masih jauh dari target standar sehingga kemungkinan kondisi

*financial distress* dapat terjadi. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya luas wilayah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial distress*.

### **Pengaruh Opini Audit Terhadap *Financial Distress***

Hasil pengujian hipotesis ketujuh memiliki nilai signifikansi sebesar 0,433 dan nilai koefisien sebesar -1,06 yang menggambarkan bahwasannya opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*, sehingga hipotesis ketujuh ( $H_7$ ) ditolak. Opini audit digunakan parlemen sebagai pengawasan sehingga opini yang buruk akan menjadi kendala ketika berbicara terkait penganggaran. Opini audit yang diberikan oleh BPK lebih menekankan kepada nilai wajar pada laporan keuangan berdasarkan kinerja keuangan secara keseluruhan pada pemerintah daerah tersebut, dan bukan berfokus kepada alokasi belanja modal saja (Indriaty, 2017).

Hasil penelitian yang memiliki hubungan negatif menjelaskan bahwa semakin wajar opini audit maka semakin kecil kemungkinan pemerintah daerah untuk mengalami *financial distress* dikarenakan opini BPK dapat menjadi tolak ukur untuk menilai akuntabilitas sebuah entitas pemerintah dan tentunya akan berdampak pada tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atas pelaporan yang disajikan (Indriaty, 2017). Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya opini audit tidak dapat mempengaruhi *financial distress*, hal ini juga dapat dilihat dari rata-rata opini audit pada kabupaten/ kota Provinsi Sumatera Barat mendapat opini WTP, akan tetapi tingkat persentase *financial distress* masih tinggi yakni sebesar 90,8%.

## **KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pengolahan data dan analisis yang peneliti lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil statistik deskriptif pada tabel 2.2 menunjukkan bahwasannya dari 19 Kabupaten/ Kota Di Provinsi Sumatera Barat dengan periode pengamatan selama 4 tahun sehingga totalnya berjumlah 76 kabupaten/ kota. Terdapat 65 pemerintah daerah yang mengalami *financial distress* dengan persentase 100% dan terdapat 11 pemerintah daerah yang tidak mengalami atau non *financial distress* dengan persentase 0,%. Maka total kondisi *financial distress* secara keseluruhan dari penelitian ini ialah sebesar 85,5% sehingga persentase menunjukkan 90,8% pemerintah daerah pada Kabupaten/ Kota Di Provinsi Sumatera Barat mengalami kondisi kesulitan dana dalam memenuhi pelayan publik atau memenuhi kebutuhan dari masyarakat.
2. Nilai signifikansi dari rasio efektivitas ialah sebesar 0,052 dan koefisien sebesar -0,041. Nilai signifikansi dari rasio efektivitas besar dari 0,05 ( $0,052 > 0,05$ ) yang menggambarkan bahwasannya rasio efektivitas berpengaruh tidak signifikan terhadap *financial distress*, untuk nilai koefisien yang negatif dari rasio efektifitas -0,041 yang menjelaskan arah dari rasio efektivitas sesuai dengan arah hipotesis namun tidak mampu membuktikan secara signifikan pengaruh rasio efektivitas terhadap *financial distress* sehingga hipotesis pertama ( $H_1$ ) ditolak.
3. Nilai signifikansi dari rasio efisiensi ialah sebesar 0,747 dan nilai koefisien sebesar 0,002. Nilai signifikansi dari rasio efisiensi lebih besar dari 0,05 ( $0,747 > 0,05$ ) yang menggambarkan bahwasannya rasio efisiensi berpengaruh tidak signifikan terhadap *financial distress*, untuk nilai koefisien yang positif dari rasio efisiensi 0,002 yang menjelaskan arah dari rasio efisiensi sesuai dengan arah hipotesis namun tidak mampu membuktikan secara signifikan pengaruh rasio efisiensi terhadap *financial distress* sehingga hipotesis kedua ( $H_2$ ) ditolak.



4. Nilai signifikansi dari rasio pertumbuhan ialah sebesar 0,095 dan nilai koefisien sebesar 0,003. Nilai signifikansi dari rasio pertumbuhan lebih besar dari 0,05 ( $0,095 > 0,05$ ) yang menggambarkan bahwasannya rasio pertumbuhan berpengaruh tidak signifikan terhadap *financial distress*, nilai koefisien dari hipotesis ketiga sebesar 0,003 yang menjelaskan tidak sesuai dengan arah hipotesis ketiga, sehingga hipotesis ketiga ( $H_3$ ) ditolak.
5. Nilai signifikansi kemandirian keuangan pemerintah daerah ialah sebesar 0,758 dan nilai koefisien sebesar -0,007. Nilai signifikansi dari kemandirian keuangan pemerintah daerah besar dari 0,05 ( $0,758 > 0,05$ ) yang menggambarkan bahwasannya kemandirian keuangan pemerintah daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap *financial distress*, untuk nilai koefisien yang negatif dari kemandirian keuangan pemerintah daerah sebesar -0,007 yang menjelaskan arah dari hipotesis keempat sesuai dengan arah hipotesis yang berarah negatif terhadap *financial distress* akan tetapi tidak signifikan sehingga hipotesis keempat ( $H_4$ ) ditolak.
6. Nilai signifikansi dari jumlah penduduk ialah sebesar 0,006 dan nilai koefisien sebesar -0,003. Nilai signifikansi dari jumlah penduduk lebih kecil dari 0,05 ( $0,006 < 0,05$ ) yang menggambarkan bahwasannya jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*, nilai koefisien dari jumlah penduduk yang memiliki arah negatif tidak sesuai dengan arah hipotesis kelima yang mempunyai arah positif terhadap *financial distress*, sehingga hipotesis kelima ( $H_5$ ) ditolak.
7. Nilai signifikansi dari luas wilayah sebesar 0,014 dan nilai koefisien sebesar 0,001. Nilai signifikansi dari luas wilayah lebih kecil dari 0,05 ( $0,014 < 0,05$ ) yang menggambarkan bahwasannya luas wilayah berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*, nilai koefisien dari luas wilayah yang memiliki arah positif sesuai dengan arah hipotesis keenam yang mempunyai arah positif terhadap *financial distress*, sehingga hipotesis keenam ( $H_6$ ) diterima.
8. Nilai signifikansi opini audit sebesar 0,433 dan nilai koefisien sebesar -1,06. Nilai signifikansi dari opini audit lebih besar 0,433 dari 0,05 ( $0,433 < 0,05$ ) yang menggambarkan bahwasannya opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*, nilai koefisien dari opini audit yang memiliki arah negatif sesuai dengan arah hipotesis ketujuh yang mempunyai arah negatif terhadap *financial distress*, akan tetapi tidak signifikan sehingga hipotesis ketujuh ( $H_7$ ) ditolak.

### **Keterbatasan**

Penelitian ini dirancang dengan sebaik-baiknya, namun penulis menyadari bahwa penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu:

1. Penelitian ini belum mampu menjelaskan hasil signifikan dari faktor keuangan, dan hanya mampu menjelaskan dua variabel karakteristik yang signifikan terhadap *financial distress*.
2. Nilai Nagelkerke  $R^2$  adalah 50,4% yang berarti kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen hanya 50,4%. Sehingga masih banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi *financial distress* pemerintah daerah.

### **Saran**

1. Untuk pemerintah daerah  
Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat lebih memperhatikan alokasi belanja modal yang bertujuan dalam memenuhi pelayanan masyarakat mengingat masih tingginya persentase *financial distress* yang dialami yakni mencapai 90,8%.
2. Untuk peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya harap mencari rasio pengukuran faktor keuangan yang mampu memoengaruhi *financial distress* secara langsung, serta menambahkan variabel lain dari faktor keuangan dan karakteristik pemerintah daerah mengingat persentase variabel lain memiliki persentase 49,6% serta variabel pada penelitian ini masih belum bias menjelaskan keseluruhan signifikansi terhadap *financial distress*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Henri; Arza, Fefri Indra. (2019). *Potrait of Accountability and Transparency in Local Budget Management by the Regional Government in West Sumatera Province, Indonesia: An Anomaly in Digital Era*. 4<sup>th</sup> Padang International Conference on Education, Economics, Business and Accounting (PICEEBA-2). Padang. 154-166.
- Cheisviyanny, Charoline; Arza, Fefri Indra; Agustin, Henri; Fitra, Halkadri. (2020). Financial Distress in Local Governments in Indonesia. In: Solikin et.al, Ed. (2020). *Public Sector Accountants and Quantum Leap: How far We Can Survive In Industrial Revolution 4.0*. London: Taylor & Francis Group. 53-56.
- Carolina, V., Merpaung, E., & Pratama, D. (2017). Analisis Rasio Keuangan dalam Memprediksi Financial Distress pada Perusahaan Manufaktur . *Jurnal Akuntansi Maratha* , 2598- 4977.
- Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri*. (n.d.). Retrieved from Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri: [www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id)
- Fatihah, & Masnun. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum dan Sesudah Diterapkan Basis Akruwal Tahun 2014-2015. *Jurnal of Economicsand and Business* .
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2015). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Deerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* , 53-64.
- Jones, S., & Walker, R. G. (2007). Explanators of Local Government Distress. *ABACUS* .
- Lane, & Erik, J. (2000). *The Public Sector Concepts, Models and Approaches*. London: SAGE Publications.
- Lazyra, K. (2016). Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan. *Skripsi* .
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIK YKPN.
- Peraturan Pemerintah Nomor : 71. (2010). *Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Rahayu, W. P., & Sopian, D. (2017). Pengaruh Rasio Keuangan dan Ukuran perusahaan terhadap financial distress. *Jurnal UMT* .
- Rusdi, D., & Fuad, K. (2018). Metode Prediksi Financial Distress di Pemerintah Kabupaten/ Kota Se- Jawa Tengah untuk Mengukur Kesejahteraan umat. *Akuntansi Dewantara* .
- Sari, M., & Arza, F. I. (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kondisi Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Se-Indonesia Periode 2015-2017 . *Wahana Riset Akuntansi* .
- Sartika, D. (2016). Analisis Prediksi Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota di Indonesia periode 2011-2013. *Naskah Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta* .
- Syurmita. (2014). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Prediksi Financial Distress . *Konferensi Regional Akuntansi ( KRA ) Dan Doktorat Kolokium* .